



BUPATI MUSI RAWAS UTARA **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2023



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2023**



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN PENABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

| Uraian | Sebelum | Sesudah |
|---|-----------------------|-------------------|
| a) Pendapatan Daerah: | Rp. 1.146.719.804.882 | 1.347.501.991.514 |
| b) Belanja Daerah: | Rp. 1.176.296.326.677 | 1.497.992.248.514 |
| Surplus / Defisit | Rp. (29.576.471.795) | (150.490.248.014) |
| a) Pembiayaan Daerah: | | |
| (1) Penerimaan: | Rp. 34.576.471.795 | 160.490.248.014 |
| (2) Pengeluaran: | Rp. 5.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Pembiayaan Netto | Rp. 29.576.471.795 | 150.490.248.014 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan | Rp. 0 | 0 |

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdistribusi terdiri dari:

| Uraian | Sebelum | Sesudah |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| a) Pendapatan Asli Daerah: | Rp. 58.355.134.112 | 56.300.597.842 |
| b) Pendapatan Transfer | Rp. 1.093.364.720.770 | 1.241.993.427.657 |

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

| Uraian | | Sebelum | Sesudah |
|--|-----|----------------|----------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. | 16.939.957.842 | 16.964.957.842 |
| b. Retribusi Daerah | Rp. | 579.345.000 | 584.345.000 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | Rp. | 33.585.831.270 | 36.501.295.000 |

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

| Uraian | | Sebelum | Sesudah |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp. | 961.621.195.000 | 1.050.949.901.887 |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp. | 131.743.525.770 | 191.043.525.770 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari :

| Uraian | | Sebelum | Sesudah |
|--------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| a. Belanja Operasi | Rp. | 621.953.601.405 | 693.361.806.041 |
| b. Belanja Modal | Rp. | 103.499.768.235 | 652.521.480.835 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| d. Belanja Transfer | Rp. | 148.342.957.036 | 149.108.957.036 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :

| Uraian | | Sebelum | Sesudah |
|---------------------------|-----|----------------|-----------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 34.575.471.795 | 160.490.248.014 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 5.000.000.000 | 10.000.000.000 |

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

| Urutan | Sebelum | Setelah |
|--|--------------------|-----------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya | Rp. 31.526.471.200 | 160.490.340.614 |

b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 0 0

- (3) Pengeluaran Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembayaran :

| Urutan | Sebelum | Setelah |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| a. Penyertaan Modal Daerah | Rp. 5.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| b. Pembayaran Utang yang Jatuh Tempo | Rp. 0 | 0 |

Pasal 5

- (1) Rincian Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) terdiri dari :

| Urutan | Sebelum | Setelah |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 314.732.785.457 | 317.073.090.695 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 287.261.825.621 | 337.919.293.093 |
| c. Belanja Bunga | Rp. 500.000.000 | 800.000.000 |
| d. Belanja Hibah | Rp. 12.221.397.053 | 28.596.922.293 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 7.237.593.273 | 9.367.554.970 |

- (2) Rincian Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) terdiri dari :

| Urutan | Sebelum | Setelah |
|---|---------------------|-----------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp. 797.316.137 | 310.409.537 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 81.649.586.178 | 66.524.607.672 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 77.797.991.218 | 106.211.038.573 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp. 278.556.209.703 | 473.692.873.321 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. 4.668.663.000 | 4.863.551.752 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. 30.000.000 | 1.000.000.000 |

- (3) Rincian Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) terdiri dari :

| | Uraian | Sebelum | Sesudah |
|---|--|--------------------|-----------------|
| a | Belanja Tak Terduga | Rp 2.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| 4 | Rincian Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari | | |
| | Uraian | Sebelum | Sesudah |
| a | Belanja Bagi Hasil | Rp 597.146.436 | 1.097.146.436 |
| b | Belanja Bantuan Keuangan | Rp 147.748.810.600 | 148.011.810.600 |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Disklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.
3. Lampiran III Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonom Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda Tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit.
pada tanggal, Agustus 2023
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2023 NOMOR

SABUPATEN NUSU KARAWAS UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DOKLASIFIKASI MEMBUTUK KELOMPOK
TENIS, OLEH, RUMAH, DAN SUB BENTAN, DITIK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Sebelum Perubahan | Terdah Perubahan | (Rp) | % |
| 5.2.06 | Bantuan Modal Aspek Lainnya | 8.100.000 | 8.100.000 | | 0% |
| 5.2.06.01 | Bantuan Modal Aspek Lainnya Aspek Tidak Berwujud | 8.100.000 | 8.100.000 | | 0% |
| 5.2.06.01.0 | Bantuan Modal Aspek Tidak Berwujud | 9.000.000 | 9.000.000 | | 0% |
| 5.2.06.01.01 | Bantuan Modal Aspek Tidak Berwujud Lainnya | 9.000.000 | 9.000.000 | | 0% |
| 5.2.06.01.01.0000 | Bantuan Modal Aspek Tidak Berwujud Aspek Tidak Berwujud Lainnya | 9.000.000 | 9.000.000 | | 0% |
| 5.2.06.05 | Bantuan Modal Aspek Lainnya Bantu | 950.000.000 | 950.000.000 | | 0% |
| 5.2.06.05.05 | Bantuan Modal Aspek Lainnya Bantu | 950.000.000 | 950.000.000 | | 0% |
| 5.2.06.05.05.0000 | Bantuan Modal Aspek Lainnya Bantu | 950.000.000 | 950.000.000 | | 0% |
| 5.1 | BELANJA TIDAK TERJUAL | 2.500.000.000 | 1.000.000.000 | (1.500.000.000) | -60% |
| 5.3.01 | Penyediaan Tenaga Kerja | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | | 0% |
| 5.3.01.01 | Penyediaan Tenaga Kerja | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | | 0% |
| 5.3.01.01.0 | Penyediaan Tenaga Kerja | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | | 0% |
| 5.3.01.01.0000 | Penyediaan Tenaga Kerja | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | | 0% |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 48.142.963.014 | (48.108.937.014) | 34.026.000 | 0% |
| 5.4.01 | Transfer Kepada Instansi | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | | 0% |
| 5.4.01.0 | Transfer Kepada Instansi | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | | 0% |
| 5.4.01.01 | Transfer Kepada Instansi Pemerintah | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | | 0% |
| 5.4.01.01.03 | Transfer Kepada Instansi Pemerintah | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | | 0% |
| 5.4.02 | Bantuan Bantuan Langsung | 38.142.963.014 | 38.108.937.014 | (34.026.000) | 0% |
| 5.4.02.01 | Bantuan Bantuan Langsung Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | 38.142.963.014 | 38.108.937.014 | (34.026.000) | 0% |
| 5.4.02.01.01 | Bantuan Bantuan Langsung Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | 38.142.963.014 | 38.108.937.014 | (34.026.000) | 0% |
| 5.4.02.01.01.0000 | Bantuan Bantuan Langsung Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | 38.142.963.014 | 38.108.937.014 | (34.026.000) | 0% |
| 5.4.02.01.02 | Bantuan Bantuan Langsung Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | 38.142.963.014 | 38.108.937.014 | (34.026.000) | 0% |
| 5.4.02.01.02.0000 | Bantuan Bantuan Langsung Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | 38.142.963.014 | 38.108.937.014 | (34.026.000) | 0% |
| | Jumlah Belanja | (178.296.826.877) | (1.497.992.243.912) | (1.319.695.417.035) | -740% |
| | Total Surplus/(Defisit) | (29.576.403.193) | (150.490.248.014) | (120.913.844.821) | -409% |
| 6 | PEMBAYARAN | | | | |
| 6.1 | PERJANJIAN PEMBIAYAAN | 14.576.403.193 | 160.490.248.014 | 145.913.844.821 | 1000% |
| 6.1.01 | Surplus Pembiayaan Anggaran Tahunan | 14.576.403.193 | 160.490.248.014 | 145.913.844.821 | 1000% |
| 6.1.01.01 | Total Surplus Anggaran Tahunan | 14.576.403.193 | 160.490.248.014 | 145.913.844.821 | 1000% |



KABUPATEN NIAS SARAWA UTARA
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DILAKUKAN MENURUT KEMUDIAN,
 JENIS OBANG, RINCIAN OBANG, SUB RINCIAN OBANG, PERUBAHAN, BUKAN TARIK PERUBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Persentase / (Rincian ang) | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 4.1.01.01.01 | Sisa Dana Arah Dana Negeri yang Alokasi Target Kinerja | 34.578.471.795 | 34.578.471.795 | 3.237.175.273 | 94 % |
| 4.1.01.01.0001 | Sisa Dana Arah Dana Negeri yang Alokasi Target Kinerja | 34.578.471.795 | 34.578.471.795 | 3.237.175.273 | 94 % |
| 4.1.01.02 | Sisa Anggaran BLSD | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.02.01 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran BLSD | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 4.1.01.02.0001 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran BLSD | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 4.2 | PEMBELAJARAN PERALAYAN | 34.578.471.795 | 650.490.248.014 | 125.913.776.279 | 364 % |
| 4.2.02 | Pembayaran Modal Daerah | 5.000.000.000 | 12.000.000.000 | 1.000.000.000 | 20 % |
| 4.2.02.01 | Pembayaran Modal Daerah pada Akaun-Singla Mata-Capaian (SAMD) | 5.000.000.000 | 12.000.000.000 | 1.000.000.000 | 20 % |
| 4.2.02.02.01 | Pembayaran Modal Daerah pada SAMD | 5.000.000.000 | 12.000.000.000 | 1.000.000.000 | 20 % |
| 4.2.02.02.0001 | Pembayaran Modal Daerah pada SAMD | 5.000.000.000 | 12.000.000.000 | 1.000.000.000 | 20 % |
| 4.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Taklin Berencana | 5.000.000.000 | 10.000.000.000 | 5.000.000.000 | 100 % |
| | Pembiayaan Negara | 29.578.471.795 | 130.490.248.014 | 120.913.776.279 | 429 % |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |

Revisi Atas Laporan APBD

30/11/2021 10:43:27 AM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 RINGKASAN PERUBAHAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
 JENIS, OBJEK, BINCAN, OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) (Rp) | % |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|----|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 53.355.134.112 | 56.300.597.842 | 2.945.463.730 | 6% |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 16.939.937.842 | 16.934.317.842 | (5.620.000) | 0% |
| 4.1.01.01 | Pajak Restoran | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.01.01 | Pajak Restoran dan Sereminya | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.01.01.0001 | Pajak Restoran dan Sereminya | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.06 | Pajak Hiburan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.08.04 | Pajak Fameran | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.08.04.0001 | Pajak Fameran | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.09 | Pajak Kakek | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Kakek | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Kakek | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.09.01.0001.0001 | Pajak Kakek | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 5.300.000.000 | 5.300.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Derasukan Sendiri | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Derasukan Sendiri | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumbat Lain | 4.900.000.000 | 4.900.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumbat Lain | 4.900.000.000 | 4.900.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.13 | Pajak Sarang Burung Walet | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.13.01 | Pajak Sarang Burung Walet | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu | 4.023.967.735 | 4.023.967.735 | 0 | 0% |
| 4.1.01.14.01 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batu Lainnya | 4.023.967.735 | 4.023.967.735 | 0 | 0% |
| 4.1.01.14.01.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batu Lainnya | 4.023.967.735 | 4.023.967.735 | 0 | 0% |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan (Perkotaan, Perkotaan (BBP)) | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.15.01 | PBBP | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 0 | 0% |

KABUPATEN MUSI BAWAS UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIELASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RENCANA OBJEK, SUB RENCANA OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) (Rp) | % |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|----|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 1.390.000.000 | 1.390.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.01.16 | Bisa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPH(TB)) | 4.180.990.106 | 4.180.990.106 | 0 | 0% |
| 4.1.01.16.01 | BPH(TB) Pemondahan Hak | 4.180.990.106 | 4.180.990.106 | 0 | 0% |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPH(TB) Pemondahan Hak | 4.180.990.106 | 4.180.990.106 | 0 | 0% |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 578.345.000 | 584.345.000 | 5.000.000 | 1% |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 151.870.000 | 151.870.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Pemampahan/Kebersihan | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Pemampahan/Kebersihan | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 26.870.000 | 26.870.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 26.870.000 | 26.870.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.01.13 | Retribusi Pengamanan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 50.000.000 | 100.000.000 | 50.000.000 | 0% |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengamanan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 50.000.000 | 100.000.000 | 50.000.000 | 0% |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 280.000.000 | 285.000.000 | 5.000.000 | 2% |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Pemakaian Alat | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.02.02 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Penjualan | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.02.02.0001 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Persewaan yang Dikonstruksi | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 187.475.000 | 187.475.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.03.01 | Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan | 87.475.000 | 87.475.000 | 0 | 0% |
| 4.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pembinaan Ijin Mendirikan Bangunan | 87.475.000 | 87.475.000 | 0 | 0% |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.286.000.000 | 2.286.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.03.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 8-JUNI | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.03.01.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 8-JUNI | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.03.01.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 8-JUNI | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 13.845.811.770 | 14.510.995.000 | 2.915.468.730 | 8% |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Pemempatan Uang Pemintah Daerah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0% |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Pemempatan Uang Pemintah Daerah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0% |

KABUPATEN MUSI BAWAS UJUPA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
JENIS OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENHAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ Berkurang |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dan Pengembalian | 5.000.000.000 | 5.230.700.000 | 230.700.000 |
| 4.1.04.15.01 | Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |
| 4.1.04.15.04 | Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengalangan Dinas | 0 | 5.230.700.000 | 5.230.700.000 |
| 4.1.04.15.04.0001 | Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengalangan Dinas Dalam Mekanisme Perjalanan Dinas B. Jua | 0 | 5.230.700.000 | 5.230.700.000 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 25.035.831.270 | 27.111.215.000 | 2.075.383.730 |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD | 25.035.831.270 | 27.111.215.000 | 2.075.383.730 |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 25.035.831.270 | 27.111.215.000 | 2.075.383.730 |
| 4.1.04.16.20 | Pendapatan BLUD dan APBD | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.04.16.20.0001 | Pendapatan BLUD dan APBD | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.091.364.720.770 | 1.241.993.427.657 | 148.628.706.887 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 961.621.195.000 | 1.052.947.907.000 | 91.326.712.000 |
| 4.2.01.01 | Dana Pembinaan | 882.081.882.000 | 970.652.000.000 | 88.570.118.000 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum: Dana Bagi Hasil (DBH) | 295.765.936.000 | 302.068.719.000 | 6.302.783.000 |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 52.150.074.000 | 52.150.074.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 6.115.160.000 | 6.115.160.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 25.482.145.000 | 25.482.145.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 5.135.280.000 | 5.135.280.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 166.649.000 | 166.649.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara Rakyat | 128.855.882.000 | 128.855.882.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 1.432.115.000 | 1.432.115.000 | 0 |
| 4.2.01.01.01.0011 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.243.841.000 | 1.243.841.000 | 0 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum: Dana Alokasi Umum (DAU) | 133.545.770.000 | 133.545.770.000 | 0 |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 133.545.770.000 | 133.545.770.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus: Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 130.738.525.770 | 130.738.525.770 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Regerasi PAUD | 1.211.280.000 | 1.211.280.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Regerasi SD | 12.999.479.000 | 12.999.479.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Regerasi SMP | 1.215.580.000 | 1.215.580.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0011 | DAK Fisik Bidang Pendidikan Regerasi Persekitaran Daerah | 494.130.000 | 494.130.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0004 | DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Regerasi KB | 21.280.290.000 | 21.280.290.000 | 0 |
| 4.2.01.01.03.0004 | DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Regerasi Jaban | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 | 0 |